



menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

Pada 1911 pendudukan Jepang pemerintahan berdasarkan pada Usumu

Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Bantul<sup>25</sup>

### a) Kondisi Geografis dan Demografis

**Gambar 2. 1. Peta Kabupaten Bantul**



Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak astrorominya antara

110°12'34" sampai 110°31'08" Bujur Timur dan antara 7°44'04" sampai 8°00'27" Lintang Selatan.

Dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Dan terdapat 75 Desa, serta 933 Dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebanyak 921.263 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 459.459 jiwa dan wanita sebanyak 461.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.818 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat 481.422 jiwa, sementara tahun 2011 menjadi 476.567 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2010 sebanyak 30.319 jiwa, turun menjadi 29.219 jiwa pada tahun 2011.

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah

penduduk Kabupaten Bantul tercatat sejumlah 911.503 jiwa

Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2010 dan laju pertumbuhan 2000-2010 (1,07%) maka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini mencapai 921.263 jiwa (Tabel II.1).

**Tabel 2.1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jumlah Laki-Laki & Perempuan
1	Srandakan	14.214	14.454	28.668	98,34
2	Sanden	14.616	15.128	29.744	96,62
3	Kretek	14.131	15.192	29.323	93,02
4	Pundong	15.543	16.236	31.779	95,73
5	Bambanglipuro	18.524	18.956	37.480	97,72
6	Pandak	23.926	23.982	47.908	99,77
7	Bantul	29.681	30.073	59.754	98,70
8	Jetis	25.887	26.426	52.313	97,96
9	Imogiri	28.008	28.528	56.536	98,18
10	Dlingo	17.609	18.058	35.667	97,51
11	Pleret	21.926	21.805	43.731	100,55
12	Piyungan	24.604	24.823	49.427	99,12
13	Banguntapan	62.127	60.383	122.510	102,89
14	Sewon	53.486	52.215	105.701	102,43
15	Kasihan	56.487	56.221	112.708	100,47
16	Pajangan	16.493	16.723	33.216	98,62
17	Sedayu	22.197	22.601	44.798	98,21
	Jumlah	459.459	461.804	921.263	99,49
	Persentase	49,87	50,13	100	

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk

berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.<sup>26</sup>

**Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (KM2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/K m2
1	Srandakan	18,32	28.668	1.565
2	Sanden	23,16	29.744	1.284
3	Kretek	26,77	29.323	1.095
4	Pundong	23,68	31.779	1.342
5	Bambanglipuro	22,7	37.480	1.651
6	Pandak	24,3	47.908	1.972
7	Bantul	21,95	59.754	2.722
8	Jetis	24,47	52.313	2.138
9	Imogiri	54,49	56.536	1.038
10	Dlingo	55,87	35.667	638
11	Pleret	22,97	43.731	1.904
12	Piyungan	32,54	49.427	1.519
13	Banguntapan	28,48	122.510	4.302
14	Sewon	27,16	105.701	3.892
15	Kasihan	32,38	112.708	3.481
16	Pajangan	33,25	33.216	999
17	Sedayu	34,36	44.798	1.304
Jumlah		506,85	921.263	1.818

Sumber : BPS, 2012

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha atau 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 % dari luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140 % dan lebih dari separuhnya

<sup>26</sup> RKPd Bantul tahun 2013

(60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km<sup>2</sup> (41,64 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup> (40,65 %). Bagian selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Snaden dan Kretek.

Secara geografis, wilayah kabupaten bantul merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 17 Kecamatan yang ada, tercatat wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Dlingo dengan luas 55,87 Km<sup>2</sup> (11,02 persennya dari total luas wilayah Kabupaten Bantul), kemudian Kecamatan Imogiri menempati wilayah terluas posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 54,49 Km<sup>2</sup> (10,75 persen), sedangkan Kecamatan Srandakan luas wilayahnya paling kecil dengan luas 18,32 Km<sup>2</sup> atau 3,61 persennya dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

b) Kebijakan Pemerintahan Daerah

Visi :

Visi Kabupaten Bantul adalah "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis." Pengertian visi tersebut yaitu bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, *ijo royo-royo*, tertib, aman, sehat, asri, sejahtera, demokratis, dan agamis akan diwujudkan melalui misi.

Misi :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif *gender*;
- 4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

Prioritas Pembangunan :

Berdasarkan kondisi, tantangan, dan peluang yang

bumi, maka prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab;
- 2) Pendidikan;
- 3) Kesehatan;
- 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal;
- 6) Pertanian dalam arti luas;
- 7) Industri kecil dan koperasi;
- 8) Perdagangan dan pasar tradisional;
- 9) Pariwisata;
- 10) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; dan
- 11) Infrastruktur, penataan ruang, dan permukiman.

c) **Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data perkembangan PDRB dapat

Uraian lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Bantul

- 1) Atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,27%;
- 2) PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp9.957.620,- menjadi Rp10.882.642,- pada tahun 2011. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp4.353.170,- pada tahun 2010 menjadi Rp4.533.848,- pada tahun 2010.

**Tabel 2. 3 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011**

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2010	9.076.401	10,95	3.967.948	4,97
2	2011 *)	10.025.776	10,46	4.176.867	5,27

Sumber: BPS, 2012

\*)

Angka

sementara

Apabila dilihat dari pergeseran sektoral, empat sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDRB berturut-turut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan dari 23,87% pada tahun 2010 menjadi 22,76% pada tahun 2011; sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik dari 10,00% pada tahun 2010 menjadi 20,22% pada tahun 2011;

sektor industri pengolahan sebesar 16,33% pada tahun 2010 menjadi 16,29% pada tahun 2011; dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan dari 13,37% pada tahun 2010 menjadi 13,51% pada tahun 2011. Koefisien *Gini Ratio* merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil. Koefisien Gini tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Koefisien Gini tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan PDRB, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.

## **B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul**

### **1. Kedudukan, Tugas, Wewenang serta Hak-Hak DPRD<sup>27</sup>**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD :

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

**Kewajiban Anggota DPRD :**

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Untuk melaksanakan kewajiban tugas di atas, DPRD dibekali dengan hak-hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler; dan .
- h. Keuangan dan administratif.

## **2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014**

DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014 dilantik pada tanggal 13 Agustus 2009. Dengan anggota yang dilantik sejumlah 45 orang. Dari 9 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bantul , terbentuk 7 fraksi yaitu:

1. Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan gabungan PDIP dan Gerindra
2. Fraksi Amanat Nasional
3. Fraksi Demokrat
4. Fraksi Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Partai Golkar

6. Fraksi Persatuan Pembangunan

7. Fraksi Karya Bangsa yang merupakan gabungan PKB dan PKPB

Dalam rangka melaksanakan dan fungsinya DPRD kabupaten Bantul dilengkap dengan alat kelembagaan berupa :

1. Pimpinan Dewan terdiri dari 4 orang
2. Komisi-Komisi( A, B, C, D )
3. Badan Musyawarah
4. Badan Anggaran
5. Badan Legislasi
6. Badan Kehormatan

Dari alat kelembagaan yang ada dan bersifat tetap DPRD juga didukung alat kelembagaan yang tidak tetap yang biasanya berbentuk : Panitia Khusus (PANSUS).

### **3. Alat Kelengkapan DPRD**

#### **2) Pimpinan DPRD**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 198/Kep/2009, Tanggal 19 Oktober 2009, pimpinan DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

**Gambar 2. 2**  
**Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014**



**TUSTIYANI, SH**  
**KETUA**



**SUHIDI, SH**  
**WAKIL KETUA**  
**WAKIL KETUA**



**SURATUN, SH**  
**WAKIL KETUA**  
**WAKIL KETUA**



**ARIF HARYANTO, S.Si**  
**WAKIL KETUA** **S.Si**  
**WAKIL KETUA**

Pimpinan DPRD Mempunyai Tugas :

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
3. Menjadi juru bicara DPRD
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
5. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD
6. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD, di Pengadilan
7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan

8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD

### **3) Komisi-Komisi**

Tugas, susunan, personalia dan pembedangan tugas komisi-komisi DPRD Periode 2009-2014 berdasarkan keputusan DPRD No. 10/Kep/DPRD/2009, tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing
- 4) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah

7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Komisi yang bertanggung jawab atas

- 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat
- 9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari :

a) Komisi A

**Tabel 2. 4 Susunan dan Personalia Komisi A DPRD Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Komisi</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Eko Julianto Nugroho, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota	Agus Effendi, S.E.
Sekretaris merangkap anggota	Sarinto, S.Pd T
Anggota :	1. Basuki Rahmat, S.E
	2. Gunawan, S.H.
	3. Drs. Timbul Harjana
	4. Betmen Sebayang, S.H.
	5. Drs. H. Suwardi
	6. Dra. Hj. Maslakah
	7. Subhan Nawwawi
	8. Dra. Sri Murtinah

Bidang tugas Komisi A:

Bidang Hukum, Pemerintahan, Pertanahan, Ketertiban masyarakat, Penerangan/Pers, Kepegawaian, Sosial Politik,

Humas, Sekretariat DPRD dan Pemberdayaan Masyarakat

b) Komisi B

**Tabel 2. 5 Susunan dan Personalia Komisi B DPRD  
Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Komisi</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Uminto Giring W, S.E., M.M, M.H.
Wakil Ketua merangkap anggota	Edy Prabowo, S.E
Sekretaris merangkap anggota	Amad Badawi
Anggota :	1. Yudha Prathessianta Wibowo, S.E
	2. Suratman
	3. H. Ichwan Tamrin Murdiyanta, S.E.
	4. Amir Syarifudin
	5. Slamet Bagya, S.E., S.IP.
	6. Jumakir

Sumber : Humas DPRD Kabupaten Bantul

**Bidang tugas Komisi B:**

Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan,  
Kehutanan, Ketahanan Pangan, Keuangan & Aset Daerah,  
Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan  
Daerah/Patungan, Penanaman Modal, Pariwisata, Seni,  
Kebudayaan, Desindustriasi, Perdagangan, Koperasi &

c) Komisi C

**Tabel 2. 6 Susunan dan Personalia Komisi C DPRD  
Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Komisi</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Drs. H. Agus Subagyo
Wakil Ketua merangkap anggota	Bariq Gufron
Sekretaris merangkap anggota	Dwi Kristiyantoro, S.T.
Anggota :	1. Hanung Raharjo, S.T
	2. Panudiyana
	3. Purwanto
	4. Wildan Nafis, S.E.
	5. H. Ary Dewanto, S.E.
	6. Agung Laksmono, S.Si
	7. Arni Tyas Palupi, S.T.
	8. Drs. H. Aslam Ridlo
	9. Agung Wisdha Sardjana, S.H.

Sumber : Humas DPRD Kabupaten Bantul

Bidang tugas Komisi C:

Bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan,  
Kebersihan, Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat,

Uraian Tugas, Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pengairan

d) Komisi D

**Tabel 2. 7 Susunan dan Personalia Komisi D DPRD  
Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Komisi</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Fachruddin, S.Ag
Wakil Ketua merangkap anggota	Jupriyanto, S.Si
Sekretaris merangkap anggota	Ispriyatun/Katir Tri Atmojo
Anggota :	1. Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti
	2. Sadjji, S.Pd.I.
	3. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md
	4. Dra. Sri Sulistyaningtyas
	5. Eko Sutirno Aji
	6. Muhammad Agusalm

Bidang tugas Komisi D:

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat,  
Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga  
Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**4) Badan Anggaran**

Susunan dan Personalia Badan Anggaran DPRD Periode  
2009-2014 berdasarkan keputusan DPRD No. 11/Kep/DPRD/2009,

tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 8 Susunan dan Personalia Badan Anggaran DPRD**

**Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Badan</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Yudha Pratesissianta Wibowo, S.E
Wakil Ketua merangkap anggota	Wildan Nafis, S.E.
Anggota :	1. Uminto Giring W, S.E., M.M,
	2. Basuki Rahmat, S.E.
	3. Suratman
	4. Ispriyatun/ Katir Triatmojo
	5. Hanung Raharjo, S.T.
	6. Purwanto
	7. Fachruddin, S.Ag
	8. H. Ichwan Tamrin M, S.E.
	9. Betmen Sebayang, S.H.
	10. H. Ary Dewanto, S.E.
	11. H. Agus Effendi, S.E.
	12. Amir Syarifudin
	13. Drs. H. Suwardi
	14. Slamet Bagya, S.E., S.IP.
	15. Arni Tyas Palupi, S.T.
	16. Hj. Maslakah
	17. Eko Sutrisno Aji
	18. Drs. H. Aslam Ridlo
	19. Subhan Nawawi
	20. Agung Wisdha Sardjana, S.H

Sumber : Humas DPRD Kabupaten Bantul

Tugas Badan Anggaran DPRD :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD

2. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan, dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

#### 5) Badan Musyawarah

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD No. 12/Kep/DPRD/2009, Tanggal 20 Oktober 2009, susunan dan personalia Badan Musyawarah DPRD Periode 2009-2014, yaitu :

**Tabel 2. 9 Susunan dan Personalia Badan Anggaran Musyawarah DPRD Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Badan</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Tustiyanti, S.H
Wakil Ketua merangkap anggota	Suratun, S.H.
	Suhidi, S.H.
	Arif Haryanto, S.Si.
Anggota :	1. Eko Julianto Nugroho, S.E.
	2. Panudiyana
	3. Dwi Kristiantoro. S.T.

	4. Drs. Timbul Harjana
	5. Gunawan, S.H.
	6. Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti
	7. Sarinto, S.Pd.T
	8. Sadji, S.Pd.I
	9. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.
	10. Edy Prabowo, S.E.
	11. Jupriyanto, S.Si.
	12. Agung Laksmono, S.Si.
	13. Drs. H. Agus Subagyo
	14. Dra. Sri Sulistyningtyas
	15. Bariq Gufron
	16. Jumakir
	17. Muhamad Agusalim
	18. Amad Badawi

Sumber : Humas DPRD Kabupaten Bantul

#### Tugas Badan Musyawarah DPRD

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan

Susunan dan Personalia Badan Legislasi DPRD Periode 2009-2014 berdasarkan keputusan DPRD No. 13/Kep/DPRD/2009, tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 10 Susunan dan Personalia Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Badan</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Drs. H. Aslam Ridlo
Wakil Ketua merangkap anggota	Drs. H. Suwardi
Anggota :	1. Uminto Giring W, S.E, M.M., M.H.
	2. Basuki Rahmat, S.E.
	3. Drs. Timbul Harjana
	4. Gunawan, S.H.
	5. Sarinto, S.Pd.T.
	6. Wildan Nafis, S.E.
	7. H. Ary Dewanto, S.E.
	8. Amir Syarifudin
	9. Hj. Maslakah

Sumber : Humas DPRD Kabupaten Bantul

**Tugas Badan Legislasi DPRD :**

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
8. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah:
9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang  
.....

## 7) Badan Kehormatan

Susunan dan Personalia Badan Kehormatan DPRD Periode 2009-2014 berdasarkan keputusan DPRD No. 14/Kep/DPRD/2009, tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 11 Susunan dan Personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul**

<b>Kedudukan dalam Badan</b>	<b>Nama</b>
Ketua merangkap anggota	Nur Rahmat Juli P, A.Md.
Wakil Ketua merangkap anggota	Gunawan, SH
Anggota :	1. H. Ichwan Tamrin M, SE
	2. Slamet Bagya, SE., S.IP
	3. Eko Sutirno Aji

Badan Kehormatan DPRD Mempunyai Tugas :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih
4. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan

## **C. Profil Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Bantul<sup>28</sup>**

### **1. Tustiyani, SH**

Tempat, tanggal Lahir : Bantul, 25 Agustus 1975

Agama : Islam

Alamat : Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul

Pendidikan Terakhir : Sarjana Universitas Widya Mataram 2002

Asal Partai : PDI Perjuangan

Dapil : Dapil V

Jabatan : Ketua DPRD, Ketua Badan Musyawarah

Keuletan dan kepolosannya saat membawa aspirasi masyarakat ternyata telah membawa kepercayaan masyarakat pada sosok politisi muda Tustiyani, SH. Hal ini terlihat bahwa tiga periode berturut-turut, ia terpilih sebagai anggota DPRD. Pada tahun 1999, ia pernah menjadi pimpinan sementara karena sebagai anggota termuda, dan untuk tahun 2009 ini iapun kembali menjadi pimpinan sementara. Keberadaannya sebagai kader partai yang loyal telah pula menghantarkan Tusti sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

Sebagai ketua DPRD, Tusti ingin menjadikan DPRD bagai sebuah bendungan yang mampu menampung aspirasi serta mengalirkannya pada hal-hal yang bermanfaat. Tentunya hal ini dapat diraihny dengan

## **2. Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti**

Tempat, tanggal Lahir : Pasuruan, 20 Oktober 1969

Agama : Islam

Alamat : Grojogan Rt 06 Wirokerten, Banguntapan,  
Bantul

Pendidikan Terakhir : Sarjana UMM 1992

Asal Partai : Partai Gerindra

Dapil : Dapil II

Jabatan : Anggota Komisi D, Anggota Badan  
Musyawarah

Dengan kendaraan Partai Gerindra dan mengikuti kompetisi di Daerah Pemilihan II, kapabilitasnya teruji dengan baik. Jadi bukanlah sebuah kebetulan saja jika Ita terpilih. Sebelum menampakkan karier di dunia politik ia pernah aktif dalam berbagai yayasan dan organisasi, salah satunya adalah Yayasan Taruna Al-Qur'an.

“Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjalankan amanah dengan sebaik mungkin” adalah menjadi pandangan hidupnya. Sejak lama menekuni dunia garment. Hal ini juga akan diwujudkan ketika diberi kepercayaan oleh konstituen maupun rakyat Bantul sebagai wakilnya. Ibu ita akan mengabdikan untuk membawa dan mengawal seluruh aspirasi rakyat agar bisa disalurkan menjadi kebijakan yang bermanfaat.

## **3. Suratun, SH**

Tempat, tanggal Lahir : Bantul, 25 Agustus 1961

Agama : Islam  
Alamat : Segoroyoso, Pleret, Bantul  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Asal Partai : Partai Amanat Nasional  
Dapil : Dapil IV  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan  
Musyawarah

Kehadiran Ibu Suratun, SH bukan untuk yang pertama setelah pada periode lalu sempat 4 tahun berada di DPRD Bantul. Prinsip agar selalu memanfaatkan waktu dengan baik, berakhlak mulia, berpandangan positif dan selalu mencari ridha dari Allah SWT dipegang hingga kini. Sebagai ibu rumah tangga, tidak mau berpangku tangan dengan hanya berkutat di dapur, maka sambil membesarkan kedua buah hatinya Zulfa Kurniawati, S.Si dan Firdaus Arifuloh, ibu Suratun, SH masih juga menyempatkan diri berwiraswasta dan aktif di organisasi sosial keagamaan di wilayahnya. Dari kegiatan PKK, Aisyah hingga mengurus anak yatim piatu dan duafa khususnya di wilayah Kecamatan Pleret. Dari latar belakang pengalaman berorganisasi tersebut, woman social worker ini sejak berdirinya Partai Amanat Nasional turut mengambil bagian sebagai salah satu kekuatan perempuan di wilayah Kecamatan Pleret, sebagai Ketua Sekar Surya. Seiring waktu dan kematangannya dalam berorganisasi terutama berpolitik maka sejak 2003 diberi mandat sebagai Ketua DPC PAN Pleret dan Wakil

Komitmen sebagai wakil rakyat kedepan, Suratun ingin semaksimal mungkin berusaha membawa aspirasi masyarakat dan akan membangun posko aspirasi masyarakat di kediaman (Segoroyoso).

**4. Dra. Sri Murtinah**

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 April 1964

Agama : Islam

Alamat : Babakan Rt 03, Poncosari, Srandakan, Bantul.

Pendidikan Terakhir : Sarjana IKIP Sanata Dharma 1986

Asal Partai : Partai Amanat Nasional

Dapil : Dapil V

Jabatan : Komisi A

**5. Dra. Sri Sulistyaningtyas**

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 16 Februari 1960

Agama : Khatolik

Alamat : Sundi Kidul Rt 30 Argorejo, Sedayu, Bantul.

Pendidikan Terakhir : Sarjana IKIP Sanata Dharma 1986

Asal Partai : Partai Golkar

Dapil : Dapil II

Jabatan : Anggota Komisi D, Anggota Badan  
Musyawarah.

Selalu bersemangat dalam menjalani setiap profesi, demikianlah kiranya ungkapan yang bisa menggambarkan sosok Sri Sulistyaningtyas.

malang puntung, Sepi ing pamrih rame ing gawe dan ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tutwuri handayani". Jika menilik dari etos terakhir bisa ditebak bahwa ibu Sri Sulistyaningtyas tidak jauh-jauh amat dengan dunia pendidikan. Memang benar, selama lebih kurang 26 tahun dari usianya dihabiskan untuk bergelut di bidang pendidikan.

Malang melintang di dunia pendidikan dijadikan modal bagi ibu Sri Sulistyaningtyas untuk mengabdikan dirinya di lembaga legislatif demi terakomodirnya suara bidang pendidikan di Kabupaten Bantul. Perjuangan dibidang lain adalah mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat Bantul dalam aspek kesehatan, KB dan Kesejahteraan sosial, mendorong untuk bisa hidup lebih baik melalui program transmigrasi dan program pembangunan padat karya dan program peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

#### **6. Arni Tyas Palupi, ST**

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 4 Januari 1981

Agama : Islam

Alamat : Nyangkringan Rt 01 Bantul.

Pendidikan Terakhir : Sarjana FT UII 2004

Asal Partai : Partai Golkar

Dapil : Dapil I

Jabatan : Anggota Komisi C, Anggota Badan Anggaran.

Muda, cantik dan aktif, begitulah kesan pertama ketika mengenal

Arni Tyas Palupi salah satu politisi termuda di DPRD Kabupaten Bantul

ini. Meskipun masih muda bukan berarti minim pengalaman, justru hobinya untuk berorganisasi mematangkan dan mendewasakannya sekaligus mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menduduki kursi dewan yang terhormat ini.

Mewakili generasi muda di Kabupaten Bantul, politisis Golkar ini ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul. Baginya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus dijalin kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Eksekutif jangan meninggalkan kesan arogan kepada masyarakat, begitupula rakyat jangan hanya jadi penonton dan cuek terhadap program-program pemerintah sedangkan legislatif harus memfungsikan diri sebagai “jembatan” antara keduanya. Dalam mengambil peran ini keduanya harus bersikap adil.

Dalam mewujudkan seluruh obsesinya, politisi yang masih “single” ini selalu berfikir positif dalam melangkah, hal ini bisa kita lihat dalam pandangan hidupnya yang memegang teguh keyakinan bahwa jika kita selalu yakin akan hal yang baik maka hal yang baik yang akan terjadi. Tidak harus percaya diri untuk menjadi yakin.

#### **7. Dra. Hj. Maslakhah**

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 31 Mei 1966

Agama : Islam

Alamat : Wonokromo II Pleret Bantul.

D. Pendidikan Terakhir : Sarjana IKIP Yogyakarta, 1992

Asal Partai : Partai Persatuan Pembangunan  
Dapil : Dapil IV  
Jabatan : Anggota Komisi A, Anggota Badan Anggaran,  
Anggota Badan Legislasi.

“Jalani hidup apa adanya, bersahaja” Aspek kesederhanaan ini begitu kental dalam pribadi Hj. Maslakhah. Penanaman nilai-nilai agama begitu penting dalam menjalani hidup sehari-hari. Sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, maka beliau menekankan arti penting aspek agama dan perilaku berbudi baik baik bagi sesama. “Setiap hari di sediakan 24 kotak/lem, maka setiap kotak harus diberi investasi kebaikan”